



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK 22742

E-mail : tapsel.naker@gmail.com Website : www.tapselkab.go.id

Nomor : 560/1721/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Upah Minimum Kabupaten
(UMKab) Tapanuli Selatan
Tahun 2023**

Sipirok, 9 Desember 2022

Kepada Yth :

Sdr. Pengurus Perusahaan

se- Kabupaten Tapanuli Selatan

di-

Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1000/KPTS/2022 tanggal 07 Desember 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan Surat Keputusan dimaksud.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN




Drs. ACHMAD RAJA NASUTION, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730619199203 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Kepala SKPD/ Camat Se Kab. Tapanuli Selatan;
4. Ketua Kadin Kab. Tapanuli Selatan;
5. Ketua DPC – K.SPSI Kab. Tapanuli Selatan;
6. Ketua DPC – SBSI Kab. Tapanuli Selatan;
7. Peringgal.



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/1000/KPTS/2022

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/949/KPTS/2022 tanggal 28 November 2022 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar Rp. 2.710.493,93/bulan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 561/7771/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Rekomendasi Penyesuaian Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.
- KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 3.090.695,- (tiga juta sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)/bulan.
- KETIGA : Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) Tahun sampai dengan 1 (satu) Tahun, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan dituangkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.

- KELIMA : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini dapat dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/784/KPTS/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Desember 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
6. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
7. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

dto

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002